

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Dika Jaya Apriani

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Irwansyah

Baihaqi

Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This research is quantitative research to exam of the implementation of Government Internal Control System (GICS) which include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of financial management. The research was conducted on the entire regional work units (40 SKPD) Bengkulu city government. Data obtained from questionnaires to 40 respondents, the top-level officials at all on education.

The results showed that the Government Internal Control System Implementation (GICS) includes control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring simultaneously affect the financial management area. The better implementation of the GICS, the better financial management. GICS components partially proven positive effect on financial management is risk assessment, information and communication, and monitoring. The better the risk assessments conducted, information and communication systems are applied, and evaluation/ monitoring of implementation GICS good, the better the financial management area in Bengkulu city government on education.

Keywords: Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Sebagai wujudnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu lahir Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan negara juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah seperti menurunnya kepercayaan publik kepada kinerja pemerintah, penyerapan anggaran yang relatif rendah atau lambat, dan lain sebagainya. Pembangunan SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (*clean government*), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardi, 2011; Artiana, 2004; Manoyasa, 2003; Ashari, 2001; Joko, 2001;).

Unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and*

benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Aktivitas pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan Unsur Pengendalian intern tersebut diatas juga sudah pernah dikembangkan oleh General Accounting Office (GAO) di Tahun 1999 untuk pemerintah federal. Kemudian oleh COSO di Tahun 2004 dan terbaru di Tahun 2011 yang meliputi kelima komponen di atas.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 karena SPIP ingin menciptakan (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2) laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) pengamanan *asset* negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2010; Ratih, 2011; Rahmani, 2012). Lebih lanjut Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa implementasi SPIP dengan semua unsurnya akan mampu menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Mulyadi (2002) juga mengatakan bahwa Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas akan pengelolaan organisasi dengan baik. Tugiman (2008) mengatakan bahwa tujuan implementasi Sistem Pengendalian Intern adalah dapat dipercaya dan integritas informasi yang dimiliki; ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan; pengamanan aktiva; ekonomis dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; dan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas program dan kegiatan yang dapat dirangkum sebagai pengelolaan manajemen keuangan daerah yang baik.

Berdasarkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi SPIP dengan kelima komponen yang ada pada pemerintah Kota Bengkulu dan kaitannya dengan Pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Apakah Implementasi SPIP (Lingkungan Pengendalian) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah? b. Apakah Implementasi SPIP (Penilaian Risiko) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah? c. Apakah Implementasi SPIP (Aktivitas Pengendalian) mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah? d. Apakah Implementasi SPIP (Informasi dan komunikasi) mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah? e. Apakah Implementasi SPIP (Pemantauan) mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membuktikan: 1. Pengaruh Implementasi SPIP (Lingkungan pengendalian) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pengaruh Implementasi SPIP (Penilaian risiko) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Pengaruh Implementasi SPIP (Aktivitas pengendalian) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Pengaruh Implementasi SPIP (Informasi dan komunikasi) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Pengaruh Implementasi SPIP (Pemantauan) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Tanjung (2008) keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Mamesa dalam Halim (2004) mengatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang telah diperbaiki dengan Nomor 21 Tahun 2011 mengatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah adalah segala unsur-unsur keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan yang meliputi: a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) penerimaan daerah; d) pengeluaran daerah; e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

1) Perencanaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang telah diperbaiki dengan nomor 21 Tahun 2011, dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah mengawali dengan perumusan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang tergabung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah dalam mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 yang telah diperbaiki dengan Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan, Peraturan kepala daerah tentang APBD dijadikan dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disingkat DPA-SKPD. Hal ini merupakan tahap awal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

3) Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 maupun

berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang diperbaiki dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

Tanjung (2008) mengatakan penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penatausahaan keuangan daerah ini meliputi:

1. Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan pada tingkat SKPKD.

4) Pelaporan Keuangan Daerah

Sebagai dasar dalam melaporkan seluruh hasil pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang telah diperbaiki dengan Nomor 21 Tahun 2011, sistem akuntansi pemerintah adalah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pada tahap pertanggungjawaban ini, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dilampiri surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kepala daerah menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa.

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah.

Tujuan utama dari implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance*. Langkah pertama yang diamanahkan di dalam PP ini adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian intern. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 komponen utama: 1) Lingkungan Pengendalian (*Environment Control*). 2) Penilaian Risiko (*Risk Valuation*). 3) Aktivitas Pengendalian (*Activity Control*). 4) Informasi dan Komunikasi (*Communication and Information*). 5. Pemantauan (*Monitoring*)

Unsur Pengendalian intern tersebut diatas juga sudah pernah dikembangkan oleh General Accounting Office (GAO) di Tahun 1999 untuk pemerintah federal yang meliputi *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring*. Kemudian oleh COSO di Tahun 2004 dan terbaru di Tahun 2011 sama dengan di atas yang mengatakan bahwa komponen Internal control adalah *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring Activities*.

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa konsep dasar dari pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1) pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan; 2) pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya, dan bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir.; 3) pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas; 4) pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Ernst & Young (2008) mengatakan bahwa implementasi Pengendalian internal untuk memberikan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko organisasi, melakukan pengendalian aktivitas yang efektifness, proses yang efisien dan berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan teknologi sistem informasi.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui: 1) Penegakan integritas dan nilai etika; 2) Komitmen terhadap kompetensi; 3) Kepemimpinan yang kondusif; 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 8) Hubungan kerja yang baik antar instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara

komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penilaian risiko terdiri atas: a) identifikasi risiko, minimal dilakukan dengan cara: menggunakan metodologi yang sesuai tujuan Instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko; b) analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi pemerintah, seperti: Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan yang dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan; Pembinaan sumber daya manusia/pegawai pemerintahan; Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi; Pengendalian fisik atas aset; Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; Pemisahan fungsi; Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pimpinan Instansi pemerintah perlu mempertimbangkan: transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian; Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting;

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan adanya pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara: menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

d. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

2.3 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 diimplementasikan dengan harapan memberikan kerangka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Implementasi SPIP diharapkan akan mampu memandu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang ada. Implementasi SPIP diharapkan akan menciptakan situasi pengelolaan manajemen keuangan pemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance* yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa implementasi SPIP dengan semua unsurnya akan mampu memperbaiki pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Implementasi SPIP akan memberikan panduan atau kerangka bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SPIP dengan kelima komponennya akan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik. Ichsan (2011) mengatakan bahwa peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi birokrasi. Mulyadi (2002) mengatakan bahwa Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Harapannya adalah dengan implementasi pengendalian intern akan mampu mencapai tujuan organisasi seperti yang diharapkan. Tujuan organisasi tercapai dengan segala indikator pengukuran kinerja yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan.

Ifrah (2012) melakukan penelitian studi kasus tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada badan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Hasil studinya menghasilkan bahwa Penyelenggaraan SPIP menjadi kebutuhan utama dalam upaya meningkatkan pertanggung jawaban, kualitas kerja dan kenyamanan kerja pegawai. BPPr dan KB telah menyelenggarakan SPIP, meskipun belum mencapai hasil optimal namun banyak membantu pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dikatakan bahwa hambatan mendasar dalam penyelenggaraan SPIP adalah belum terumuskan kegiatan secara terencana, dan keterbatasan anggaran dalam menyelenggarakan kegiatan.

Tugiman (2008) mengatakan bahwa tujuan implementasi Sistem Pengendalian Intern adalah dapat dipercaya dan integritas informasi yang dimiliki; ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan; pengamanan aktiva; ekonomis dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; dan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas program dan kegiatan. Dengan demikian implementasi sistem pengendalian intern akan memandu organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang

ada, sehingga tercipta pengelolaan pemerintahan yang lebih baik termasuk pengelolaan manajemen keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif. Implementasi SPIP yang harus komprehensif dengan kelima komponennya yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta evaluasi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya bertahap dan terus menerus melaksanakannya. Kelima komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya pada saat diimplementasikan dalam pemerintahan. Penelitian ini memang mencoba untuk mengevaluasi masing-masing komponen SPIP yang diterapkan pada pemerintah Kota Bengkulu. Dengan melihat masing-masing komponen ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih jelas tentang kondisi implementasi SPIP di pemerintah Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kelima komponen tersebut nantinya akan terlihat komponen SPIP mana dengan indikatornya yang masih lemah dan bagaimana kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga akan dapat dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah dalam implementasinya.

Berdasarkan kajian pustaka, konsep dan penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat hipotesis yang akan diajukan adalah:

H1: Implementasi SPIP (Lingkungan Pengendalian) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

H2: Implementasi SPIP (Penilaian Risiko) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

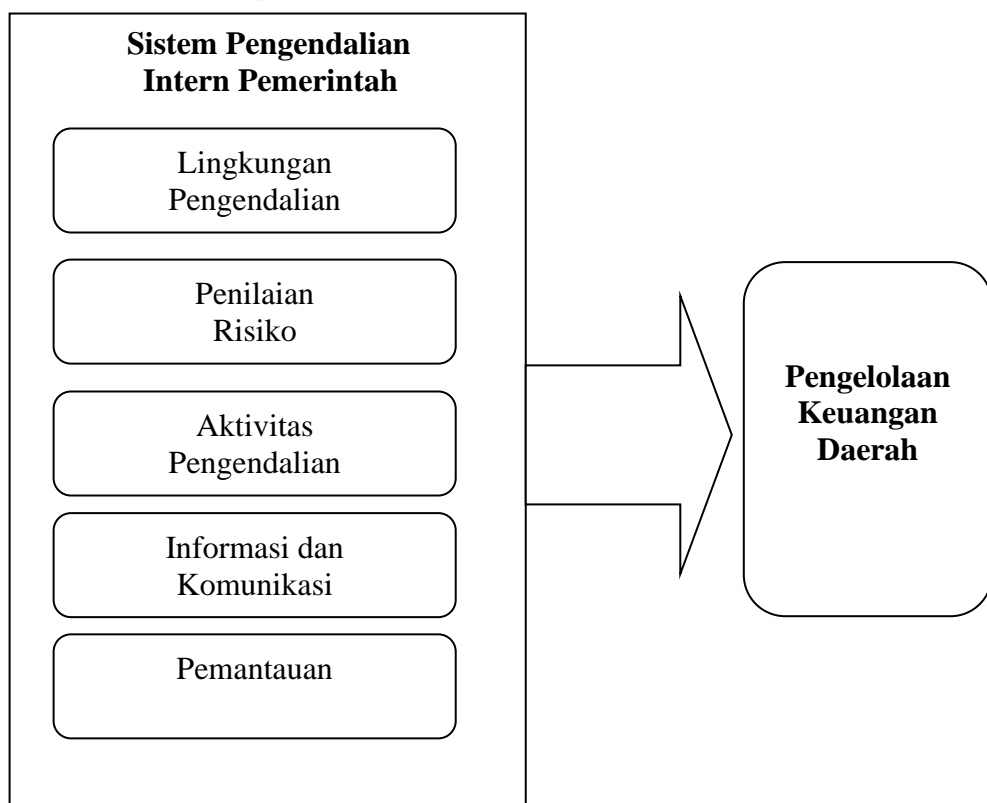
H3: Implementasi SPIP (Aktivitas Pengendalian) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

H4: Implementasi SPIP (Informasi dan Komunikasi) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

H5: Implementasi SPIP (Pemantauan) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Model Penelitian

Gambar 2.1 Model penelitian



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jenis penelitian ini disebut juga kausal komparatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara berbagai variabel penelitian dan hubungan perbandingan yang terjadi. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2012).

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- a. Implementasi Manajemen Keuangan Daerah: adalah implementasi yang diterapkan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Indikator dari variabel ini adalah proses manajemen keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 mempunyai lima unsur yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian: kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, untuk pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Indikator variabel ini adalah: integritas dan etika, komitmen, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, aturan pembinaan SDM, aparat pengawas, dan hubungan kerjasama. Variabel ini diukur dengan 8 item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator di atas dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).
- 2) Penilaian Resiko; kegiatan penilaian atas kemungkinan risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Indikator variabel ini adalah identifikasi risiko, dan menganalisis risiko. Variabel ini diukur dengan 3 item pernyataan yang dikembangkan dari indikator di atas dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).
- 3) Aktivitas Pengendalian; tindakan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Indikator variabel ini adalah review kinerja, sumberdaya manusia, pengendalian sistem informasi, fisik dan aset, penetapan indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatan akurat, pembatasan akses, akuntabilitas sumberdaya, dokumentasi. Variabel ini diukur dengan 11 item pernyataan yang dikembangkan dari indikator di atas dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).
- 4) Informasi dan Komunikasi; adalah kewajiban pemerintah daerah mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Indikator variabel ini adalah menyediakan, mengevaluasi serta mengembangkan.

Variabel ini diukur dengan 3 item pernyataan yang dikembangkan dari indikator di atas dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

- 5) Pemantauan; memastikan apakah sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Indikator variabel ini adalah pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut. Variabel ini diukur dengan 3 item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator di atas dengan menggunakan skala Likert dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu. *Sample* adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan adalah seluruh SKPD sehingga metode sample adalah sensus. Sumberdata penelitian ini adalah pegawai/pejabat pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi Kepala Dinas/Kantor/Badan, Sekretaris atau wakil kepala Dinas/Kantor/Badan, Kabag dan Kabid. Digunakannya pejabat sebagai sampel dalam penelitian ini dengan harapan mereka memahami tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60/2008), dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 21/2011).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden pada seluruh SKPD dengan harapan untuk memperoleh tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi. Setiap responden yang sudah diidentifikasi diberikan kuesioner dan setelah itu akan dijemput kuesioner tersebut dengan harapan apabila responden memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait kuesioner akan dapat dipenuhi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan pengujian hipotesis.

a. Statistik Deskriptif:

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi masing-masing variabel yang ada.

b. Uji Kualitas Data:

Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan kuesioner yang digunakan benar-benar valid dan reliabel dalam mengukur variabel, dengan cara:

- 1) **Uji Validitas** untuk menentukan tingkat akurasi data. Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menguji masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dari tampilan *output Cronbach Alpha* pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor tiap konstruksinya signifikan pada level 0.01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011).

- 2) **Uji Reliabilitas** untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel bila *Cronbach alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2011).

c. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian uji asumsi klasik yang dilakukan sebanyak tiga macam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dikarenakan pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data kuesioner murni.

- 1) **Uji Normalitas** adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yakni dengan *kolmogorov-smirnov test*. Nilai signifikansi dari residual yang terdistribusi secara normal jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) dalam uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* lebih besar dari 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011).
- 2) **Uji Multikolinearitas** untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Toleransi. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (Ghozali, 2011).
- 3) **Uji Heteroskedastisitas** untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan lain. Apabila *variance* dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastik sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2011).

d. Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis dikembangkan persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan variabel bebas yaitu X₁ X₂ X₃ X₄ X₅. (Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ = Lingkungan pengendalian

X₂ = Penilaian risiko

X₃ = Aktivitas pengendalian

X₄ = Informasi dan Komunikasi

X₅ = Pemantauan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi Transparansi

α = konstanta

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Responden

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan secara langsung kuesioner sebanyak 60 kuesioner kepada aparatur pegawai/manajer tingkat atas pada seluruh SKPD (30 SKPD) yang ada di pemerintah Kota Bengkulu Kuesioner disebarkan dengan cara mengantar langsung kepada responden atau SKPD yang bersangkutan. Kuesioner ditinggal kemudian diambil kembali. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data selama 4 minggu. Jumlah

kuesioner yang dikirimkan sebanyak 60 kuesioner, dengan jumlah kuesioner yang kembali adalah 46 kuesioner (76,67%).

Dari 46 kuesioner yang kembali, sebanyak 6 kuesioner tidak lengkap jawaban sehingga tidak dipergunakan dalam analisis data. Jumlah kuesioner yang dipergunakan dalam analisis data penelitian ini adalah sebanyak 40 atau 86,96% dari kuesioner yang kembali atau 66,67% dari yang diedarkan.

Responden yang terlibat dalam penelitian ini umumnya laki-laki, artinya pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu umumnya pejabat tingkat atas adalah laki-laki sebanyak 28 orang (70,00%). Dilihat dari sisi umur atau usia responden, mayoritas berada pada usia 36 s.d 45 tahun sebanyak 20 orang (50,00%), dan di usia 46 s.d 55 tahun sebanyak 14 orang (35,00%). Dilihat dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan S2 sebanyak 23 orang (57,50%). Dilihat dari lama bekerja sebagai aparatur pegawai pada pemerintah Kota Bengkulu mayoritas berada pada 11 s.d 15 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 45,00%, dan selama 16 s.d 20 tahun sebanyak 13 orang (32,50%). Berdasarkan data responden ini dapat kita simpulkan bahwa responden umumnya laki-laki, pendidikan mayoritas Master (S2), dan lama bekerja cenderung sudah lama. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui umumnya responden adalah level pejabat pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu sesuai dengan tujuan responden yang diinginkan yaitu memahami implementasi SPIP.

4.2 Statistik Deskriptif Penelitian

Dilihat secara keseluruhan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta evaluasi sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai rata rata aktual yang lebih tinggi dari nilai rata teoritis.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

| Variabel | Rentang Teoritis | Rata-rata Teoritis | Standar deviasi | Rentang Aktual | Rata-rata Aktual |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Pengelolaan Keuangan | 16 – 80 | 48 | 7.54542 | 48 - 78 | 60.7000 |
| Lingkungan Pengendalian | 8 – 40 | 24 | 3.29637 | 26 - 40 | 32.8250 |
| Pengendalian Resiko | 3 – 15 | 9 | 3.58692 | 3 - 15 | 9.5750 |
| Aktivitas Pengendalian | 11 – 55 | 33 | 6.78417 | 24 - 53 | 37.9750 |
| Informasi dan Komunikasi | 3 – 15 | 9 | 1.88380 | 8 - 15 | 11.8000 |
| Pemantauan | 3 – 15 | 9 | 2.27007 | 7 - 15 | 11.7750 |

Sumber: Data diolah, 2013

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas Data

Untuk menguji validitas dari suatu data penelitian dapat menggunakan analisis *pearson correlation* dimana jika total dari analisis menunjukkan nilai < 0.01 atau < 0.05 maka data dikatakan valid. Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 4.2 Uji Validitas Data

| No | Variabel | Pearson Correlation | Signifikan | Status |
|----|--------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 1 | Pengelolaan Keuangan | .350*-.742** | 0.027 – 0.000 | Valid |
| 2 | Lingkungan Pengendalian | .526**-.813** | 0.000 – 0.000 | Valid |
| 3 | Penilaian Resiko | .859**-.925** | 0.000 – 0.000 | Valid |
| 4 | Aktivitas Pengendalian | .369*-.847** | 0.019 – 0.000 | Valid |
| 5 | Informasi dan komunikasi | .693**-.776** | 0.000 – 0.000 | Valid |

| | | | | |
|---|------------|-----------------|---------------|-------|
| 6 | Pemantauan | .841** - .868** | 0.000 – 0.000 | Valid |
|---|------------|-----------------|---------------|-------|

Sumber: Data diolah, 2013

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa semua variabel adalah valid, hal ini terlihat dari nilai signifikansi dari semua variabel memiliki nilai dibawah 0.10 yaitu bernilai 0.000. Semua pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel adalah valid sehingga dapat dijadikan sebagai pengukur variabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas Data

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini. Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa semua variabel adalah reliabel. Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach Alpha* yang > 0,6. Sehingga tidak terjadi masalah pada uji reliabilitasnya.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|----|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Pengelolaan Keuangan | 0.857 | Reliabel |
| 2 | Lingkungan Pengendalian | 0.814 | Reliabel |
| 3 | Penilaian Resiko | 0.870 | Reliabel |
| 4 | Aktivitas Pengendalian | 0.840 | Reliabel |
| 5 | Informasi dan komunikasi | 0.651 | Reliabel |
| 6 | Pemantauan | 0.811 | Reliabel |

Sumber: Data diolah, 2013

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *alpha* yaitu sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Asymp Sig* lebih dari 0.05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data

| Variabel | <i>Asymp Sig (2-tailed)</i> | Keterangan |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Pengelolaan Keuangan | 0.415 | Normal |
| Lingkungan Pengendalian | 0.178 | Normal |
| Penilaian Resiko | 0.249 | Normal |
| Aktivitas Pengendalian | 0.257 | Normal |
| Informasi komunikasi | 0.104 | Normal |
| Pemantauan | 0.113 | Normal |

Sumber: Data diolah, 2013

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Signifikansi | Keterangan |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Lingkungan Pengendalian | 0.062 | Bebas |
| Penilaian Resiko | 0.944 | Heteroskedastisitas |
| Aktivitas Pengendalian | 0.064 | |
| Informasi Komunikasi | 0.078 | |
| Pemantauan | 0.070 | |

Sumber: Data diolah, 2013

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa untuk semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga semua variabel tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa semua variabelnya memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, sehingga semua variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collenearity Statistics | | Keterangan |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Lingkungan Pengendalian | 0.627 | 1.595 | Bebas |
| Penilaian Resiko | 0.707 | 1.414 | Multikolinearitas |
| Aktivitas Pengendalian | 0.516 | 1.939 | |
| Informasi dan Komunikasi | 0.579 | 1.727 | |
| Pemantauan | 0.601 | 1.664 | |

Sumber: Data diolah, 2013

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *Adjust R Square* sebesar 0,765 menunjukkan bahwa 76,50% variabel Pengelolaan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sedangkan sisanya sebesar 23,50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Nilai statistik F sebesar 26.424 dengan nilai signifikansi $p = 0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara simultan implementasi SPIP berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 3

| Variabel | Nilai Koefisien | t- statistik | Sig. | Konfirmasi Hipotesis |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|
| | | | | |
| Lingkungan Pengendalian | -0.415 | -1.489 | 0.073 | Ditolak |
| Penilaian Resiko | 0.752 | 3.873 | 0.000 | Diterima |
| Aktivitas Pengendalian | 0.120 | 1.003 | 0.323 | Ditolak |
| Informasi dan komunikasi | 1.282 | 3.140 | 0.003 | Diterima |
| Pemantauan | 1.454 | 4.371 | 0.000 | Diterima |
| R Square | 0.795 | | | |
| Adj R Square | 0.765 | | | |
| F | 26.424 | | | |
| Sig. | 0.000 | | | |

Sumber: Data diolah, 2013

Hasil pengujian parsial menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,415 dengan nilai signifikansi $0,073 < 0,05$ yang berarti bahwa tidak ada pengaruh implementasi SPIP (Lingkungan pengendalian) terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan dimana terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan sehingga **Hipotesis pertama ditolak**.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh implementasi SPIP (Penilaian resiko) terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar 0,752 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel penilaian resiko terhadap pengelolaan keuangan. Semakin baik implementasi SPIP untuk penilaian risiko yang dilakukan di SKPD pemerintah Kota Bengkulu maka akan semakin baik pengelolaan keuangan yang ada. Hasil pengujian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat sehingga **Hipotesis kedua diterima**.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh SPIP (Aktivitas pengendalian) terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar 0,120 dengan nilai signifikansi $0,323 > 0,05$ yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Aktivitas pengendalian terhadap pengelolaan keuangan. Hasil pengujian tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana terdapat pengaruh aktivitas pengendalian terhadap pengelolaan keuangan sehingga **Hipotesis ketiga ditolak**.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh implementasi SPIP (Informasi dan komunikasi) terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar 1,282 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel implementasi SPIP (informasi dan komunikasi) terhadap pengelolaan keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana terdapat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pengelolaan keuangan sehingga **Hipotesis keempat diterima**.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh implementasi SPIP (Pemantauan) terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 terlihat bahwa nilai koefisien sebesar 1,454 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pemantauan terhadap pengelolaan keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana terdapat pengaruh implementasi SPIP (pemantauan) terhadap pengelolaan keuangan sehingga **Hipotesis kelima diterima**.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi SPIP (Lingkungan pengendalian) yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti lingkungan pengendalian belum tersosialisasi dengan baik dan belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. 2) Implementasi SPIP (Pengendalian resiko) yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti Semakin baik proses pengidentifikasian resiko dan melakukan analisis terhadap resiko dalam konteks pengendalian intern maka akan semakin baik pengelolaan keuangan daerah.

3) Implementasi SPIP (Aktivitas pengendalian) yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu terbukti tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. Ini berarti Aktivitas pengendalian belum mampu membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. 4) Implementasi

SPIP (Informasi dan komunikasi) yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. . Ini berarti Informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telah mampu membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. 5) Implementasi SPIP (Pemantauan) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Bengkulu terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan SKPD pemerintah Kota Bengkulu. . Ini berarti Pemantauan yang dilakukan oleh SKPD pemerintah Kota Bengkulu telah mampu membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Semakin baik sistem pemantauan dan evaluasi implementasi sistem pengendalian intern yang dilakukan, maka akan semakin baik pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagi SKPD dan pemerintah Provinsi Bengkulu hendaknya hasil penelitian ini memberikan pemahaman betapa pentingnya menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 yang meliputi Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan. Implementasi PP ini dalam rangka membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang baik guna melindungi aset pemerintah. Sesuai dengan tujuan implementasi PP ini adalah menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (*clean government*), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu pemerintah daerah hendaknya melakukan evaluasi dan pembenahan dengan baik dalam pengimplementasian PP ini.

2) Tidak terbuktinya dua komponen SPIP ini berupa Lingkungan pengendalian dan Aktivitas pengendalian akan meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, hendaknya menjadi catatan bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk mengevaluasi kembali berbagai kondisi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Implementasi SPIP untuk Lingkungan pengendalian dan Aktivitas pengendalian hendaknya dilakukan pembenahan kembali akan komponen-komponen yang belum dilakukan dengan baik. Untuk tiga komponen lainnya hendaknya terus dilaksanakan dan dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh implementasi SPIP untuk dua komponen berupa Lingkungan pengendalian dan Aktivitas pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidakmampuan membuktikan hipotesis ini kemungkinan kelemahan dalam jumlah data yang masih sedikit. 2) Ketidakmampuan membuktikan hipotesis kemungkinan disebabkan juga karena data yang belum sempurna karena variasi jawaban responden dan karakteristik responden yang tidak merata.

Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan tambahan terhadap data penelitian dengan memperbanyak sample penelitian. 2) Peneliti selanjutnya berusaha untuk mendapatkan responden yang mempunyai karakteristik yang mendekati sama, dan juga melakukan evaluasi variasi jawaban responden kemungkinan yang belum baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Artjana, I Gede. 2004. *Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good governance Tantangan dan Harapan*.(online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: <http://www.propatria.or.id>.
- Ashari, Edy Topo; dan Fernando, Desi. 2001. *Membangun Kepemerintahan yang Baik. (Bahan ajar Diklat PIM Tingkat III)*. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2011 *Internal Control - Integrated Framework*.
- Dadang Solihin, 2007. *Pengukuran good Governance Index Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik*—BAPPENAS.
- Ernst & Young, 2008. *The Future of Risk Management and Internal Control*. EYGM Limited.
- Ghozali, 1. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
- General Accounting Office (GAO), 1999. *Internal Control*. United States General Accounting Office.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Yogyakarta.
- Hasmah, Ridho, 2010. *Menyongsong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Tersedia di World Wide Web: Diakses 12 Januari 2013.
- Indriantoro & Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Ichsan, Muhammad, 2011. *Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjaga Integritas Pejabat dan Pegawai Pemerintah*". Diakses Januari 2013. Home About Career Event Galery Peraturan Contact.
- Ifrah, 2012. *Studi Kasus Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat*. Diakses 12 Januari 2012.
- Joko, Widodo, 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006.
-, 2010 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (online)*. (Diakses tanggal 5 Nopember 2012) Sumber: <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2037665-kinerja-pemerintah-daerah/#ixzz2BL0FgvdS>
-, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2002. *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta
- Monoyasa, I wayan, 2003. *Mungkinkah Good governance Terwujud di Era Otonomi Daerah?* (online). (diakses tanggal 10 Agustus 2012). Tersedia di World Wide Web: <http://www.bpkp.go.id>.
- Mardi, 2011. *Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat*. Diakses Januari 2013,
- Ratih, Asri Eka, 2012. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. *Tesis*. USU. Medan.
- Rahmani, SN. 2011. *Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Diakses Januari 2013. Tersedia di World Wide Web.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan*.
-, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
-, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
-, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40.
-, 2004. *Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Tamita Utama.
-, 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
-, 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara*
-, 2007. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*.

-, 2007. *Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rahmanurrasjid, Amin, 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro-Semarang.
- Sugiyono, 2012. *Method Penelitan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
-, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008a, *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.
-, 2008b, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan pertama, Alfabeta Bandung.
- Tugiman, Hiro, 2008. *Qualified internal auditor*. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.